



Media: Tribun Jogja

Hari: Sabtu

Tanggal: 28 Juli 2018

Halaman: 19

# Pemkot Tidak Cocok soal Harga

## ■ Pengadaan Lahan RTHP Mantrijeron Gagal

**YOGYA, TRIBUN** - Pengadaan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) di Mantrijeron gagal dilaksanakan hingga triwulan II Tahun 2018. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta Harry Satya Wacana menjelaskan hal tersebut terjadi lantaran tidak ada kesepakatan harga antara Pemkot dengan pemilik lahan.

"Kita mekanismenya jelas, yakni dengan *appraisal*. Lalu yang menjual tidak ada kecocokan harga," ungkapnya. Jumat (27/7).

Harry menjelaskan bahwa pihak Pemkot hanya akan membeli lahan tersebut berdasarkan hitungan *appraisal*. Sementara sang pemilik lahan meminta harga jauh di atas *appraisal*.

"Jelas kita tidak bisa membeli dengan harga di atas *appraisal*. Pembebasan lahan untuk keperluan RTHP kami anggarkan Rp4 miliar. Nanti akan kami lapor kan di APBD Perubahan," terangnya.

Selain gagalnya penga-

**Jelas kita tidak bisa membeli dengan harga di atas appraisal. Pembebasan lahan untuk keperluan RTHP kami anggarkan Rp4 miliar. Nanti akan kami lapor kan di APBD Perubahan.**

Harry Satya Wacana  
Kepala Dinas Pertanahan dan Tata  
Ruang Kota Yogyakarta

daan lahan di Mantrijeron, Harry menjelaskan untuk pengadaan lahan di Suryatmajan masih dalam proses. Hal tersebut dikarenakan status lahan masih turun waris. "Kalau seperti itu kita

tidak bisa secara administratif melakukan pengadaan," ungkapnya.

Menyikapi kenaikan harga tanah di Kota Yogyakarta setiap tahunnya, sementara Pemkot memiliki target dalam setahun harus melakuk an pengadaan lahan untuk RTHP. Harry menuturkan bahwa semua berdasarkan taksiran harga appraisal.

"Harga pasar ikut menjadi faktor penting. Untuk dibeli oleh Pemkot, tidak begitu jauh dari harga pasaran. Biasanya banyak yang mau menjual itu karena untuk kepentingan bersama," ungkapnya.

Harry menambahkan, hingga saat ini sudah banyak proposal dari warga yang mengajukan pengadaan RTHP. Pihaknya belum bisa memutuskan saat ini dikarenakan perlu melakuk an tinjauan terlebih dahulu terhadap seluruh proposal yang masuk.

"Tidak hanya proposal dari warga Mantrijeron, tapi dari seluruh Kota Yogyakarta," terangnya.

### Deviasi fisik

Sebelumnya, dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Bangunan Triwulan II Tahun 2018, Kepala Bappeda Kota Yogyakarta Edy Muhammad mengatakan, kinerja fisik memiliki target 48,88 persen dengan realisasi 45,49 persen.

"Deviasi fisik triwulan II tahun 2018 sebesar 3,39 persen," ungkapnya.

Faktor penghambat dalam capaian kinerja fisik tersebut, lanjutnya, yakni dikarenakan beberapa hal. Salah satunya terkait pengadaan lahan untuk RTHP tersebut.

"Pengadaan tanah RTHP di Kelurahan Mantrijeron yang gagal mencapai kesepakatan dan pengadaan tanah di Kelurahan Suryatmajan mundur dari tata kala," tandasnya.

Selain hambatan pengadaan lahan, faktor lainnya yakni ada beberapa pekerjaan konstruksi yang mundur dari tata kala serta terdapat pekerjaan yang mengalami gagal lelang yakni IPAL Tahu dan Batik. "Tidak ada pihak ketiga yang mendaftarkan diri," ujar Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta. (kur)

Inetanei Nilai Berita Sifat Tindak Lanjut

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pertanahan dan Tata Ruan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 November 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005